

PEMBENTUKAN BINTARA PEMBINA POTENSI MARITIM DI POS ANGKATAN LAUT PERSPEKTIF HUKUM MARITIM

Mangisi Simanjuntak

simanjuntakmangisi1@gmail.com

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

Abstract

Maritime is a source of energy, a source of food and as a source of wealth as well as means of transportation and defense media that must be developed and maintained and secured for the benefit of the nation and the people of Indonesia. For the development, defense and security of the maritime potential, it is necessary to increase all work units in the agencies engaged in maritime potential, especially the Navy outpost. However, all of them do not have personnel or Maritime Potential Builders who are able to sharpen the implementation of the tasks of fostering human resources and developing natural resources in maritime potential through social communication methods, fostering regional resilience and social services. Faced with the increasingly complex problems and the growing challenges of developing all the more effective maritime potential in achieving the goal of making Indonesia a global maritime axis.

Keyword : maritime; defense and security; the Navy; natural resources.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki sumber daya alam dan potensi maritim yang tiada taranya. Kekayaan maritim tersebut secara turun temurun telah dimanfaatkan oleh nelayan kita jauh sebelum negara kita merdeka. Nelayanlah sebenarnya pemilik nusantara ini, merekalah yang memiliki maritim Indonesia yang kaya raya ini.¹ Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau sejak lama telah ramai dihuni oleh penduduk. Mereka tentunya bukannya penduduk yang bersifat statis melainkan dinamis, artinya senantiasa berinteraksi dengan sesama penduduk di kepulauan yang sama dan juga dengan para pendatang yaitu musafir dari Arab, India dan Cina.²

Maritim berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan laut,³ Kekayaan maritim Indonesia tersebut berupa

sumber daya ikan, rumput laut, dan sebagainya, yang tentunya bisa menghasilkan sumber daya pangan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat nelayan pada khususnya sehingga dapat terwujud ketahanan pangan bangsa Indonesia.

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi di mana terpenuhinya pangan bagi negara dan bagi perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi⁴ Ketersediaan pangan yang bersumber dari maritim memerlukan pengembangan potensi sehingga dapat meningkatkan kuantitas maupun kualitas pangan tersebut.

Sebagai negara maritim, Indonesia harus peduli dan mampu dalam mengelola sumber daya alam dari dasar hingga permukaan lautnya dan bahkan mampu mengelola lautan samudera, dan juga dalam berbagai aspek diantaranya aspek ekonomi, geopolitik, serta aspek militer yang tercermin dalam kebijakan poros

1. Maritime Review ppal, *Momentum Menyelesaikan Masalah Mendasar di Laut Sebagai Prasyarat Terwujudnya Negara Maritim yang Maju*, Penerbit : Persatuan Purnawiwana Angkatan Laut, Jakarta 2017, hal 40.

2. Agus Aris Munandar dalam Jurnal Maritim Indonesia, *Pertumbuhan Ekonomi Maritim di Kepulauan Nusantara*, Penerbit : Pusat Pengkajian Maritim, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, September 2018, hal 39.

3. M. Husseyin Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia*, Penerbit : Fikahati Aneska, Jakarta 2015, hal 3.

4. Didit Herdiawan, *Kedaulatan Pangan Maritim, Dinamika & Problematika*, Penerbit : Lembaga Ketahanan Nasional RI, Jakarta, 2016, hal 2

maritim dunia sebagai *ocean policy*-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁵ Oleh karena itu, sumber daya alam di laut dan potensi maritim lainnya sudah saatnya dikelola dengan teknologi tinggi dan seharusnya selalu dikembangkan oleh instansi-instansi yang bergerak di bidang maritim termasuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

Salah satu tugas TNI AL menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut (Dawilhanla).⁶ Dawilhanla dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan dan pembinaan potensi maritim. Upaya tercapainya pembinaan kemampuan dan kekuatan tugas Dawilhanla tersebut memerlukan pengaturan pembinaan organisasi potensi maritim (Potmar) baik di tingkat Armada, Lantamal maupun Lanal serta Pos Angkatan Laut sebagai salah satu metode dan tata cara pembinaan kekuatan TNI AL.

Untuk tingkat Armada dan Lantamal pejabat potensi maritim sudah diwadahi dengan adanya jabatan Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) dan jabatan Kepala Dinas Potensi Maritim (Kadispotmar). Untuk tingkat Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) sudah ada Perwira Staf Potensi Maritim (Paspotmar) sedangkan di tingkat jajaran Pos Angkatan Laut (Posal) diseluruh Indonesia saat ini belum ada pejabat yang mengawaki jabatan potensi maritim. Oleh karena itu, diperlukan penataan personel berupa pembentukan Babinpotmar berdasarkan fungsi dan tugas pengawak organisasi potensi maritim guna mempertajam pelaksanaan tugas pembinaan potensi maritim melalui metode komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah dan bakti TNI AL yang diharapkan dapat bersinergi dengan aparat maritim lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penulisan pembentukan Bintara pembina potensi maritim di Posal-Posal ini, penulis menggunakan teori :

5. Herry Setianegara, *Strategi Maritim Pada Perang Laut Nusantara dan Poros Maritim Dunia*, Penerbit : leutikaprio, Yogyakarta, 2014, hal 133-134.

6. Pasal 9 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Teori A. T Mahan.⁷

Dalam bukunya "*The Influence of Sea Power Upon History*" menyatakan sebagai berikut :

- 1) Kekuatan laut terdiri dari : armada angkatan laut, armada niaga dan pangkalan.
- 2) Perkembangan kekuatan laut dipengaruhi oleh :
 - a) Geografi
 - b) Posisi wilayah
 - c) Luas wilayah
 - d) Jumlah dan karakter penduduk
 - e) Watak bangsa
 - f) Sikap pemerintah.
- 3) Strategi maritim menurut A.T. Mahan adalah penguasaan laut yaitu menjamin penggunaan laut untuk kepentingan sendiri serta menutup peluang lawan untuk mengunakannya. Penguasaan laut hanya dapat dicapai dengan menghancurkan satu-satuan lawan atau blokade.

Dengan mengacu pada teori A. T Mahan ini, untuk dukungan Pangkalan terhadap kekuatan armada Laut dan sikap pemerintah untuk mempengaruhi perkembangan kekuatan laut maka pembentukan Babinpotmar sudah saatnya diwujudkan guna pengembangan dan pembinaan potensi maritim serta pengendalian wilayah pertahanan laut yang memberikan dampak penangkalan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang akan mengganggu kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Teori Turner⁸

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Vice Admiral Stanfield Turner dalam bukunya "*Naval War College Review*" yang menyatakan bahwa angkatan laut diantaranya :

- 1) Penangkalan strategis dengan tujuan untuk :
 - a) Menangkal seangan lawan
 - b) Menunjukkan kepada calon lawan bahwa yang bersangkutan akan menghadapi resiko besar bila melaksanakan niatnya.
 - c) Mempertahankan stabilitas politik.
- 2) Pengendalian laut bertujuan untuk :

7. AT. Mahan, *The Influence Of Sea Powre Upon History* 1660-1763, Boston and Company, Twelf Edition, hal 28-29.

8. Stanfield Turner, *Mission of the Navy*, Naval War College Review, March-April, hal 2.

- a) Melindungi dan mengamankan jalur laut untuk kepentingan dukungan bahan-bahan industri.
- b) Perkonomian/ perdagangan.
- c) Dukungan logistik operasi militer.

Mengalir dari teori Turner ini, penangkalan strategis dan pengendalian laut dilakukan dengan penguatan ujung tombak Pangkalan TNI AL dalam hal ini Posal-Posal yaitu berupa adanya jabatan-jabatan baru yakni jabatan Babinpotmar yang dapat mendukung memperkuat serta mengendalikan wilayah pertahanan laut karena pertahanan dan keamanan di laut merupakan perwujudan dari strategi pengendalian dan penangkalan laut sebagai bidang tugas TNI AL.

Teori Lingkungan Strategi Maritim

Tujuh puluh persen dari permukaan bumi adalah lautan dan lebih dari dua pertiga penduduk dunia hidup dalam radius 100 mil laut. Pada umumnya sejauh 200 mil laut, bahkan beberapa negara lebih dari itu. Kegiatan maritim manusia yang paling banyak, baik berupa pelayaran, penangkapan ikan dan eksplorasi minyak, dilaksanakan di dalam zona pantai 200 mil tersebut. Hal ini memberikan pemahaman atas fakta, bahwa bagian penting dari kegiatan ekonomi, politik maupun militer daripendudukduniadilakukandalamkawasandaratanlaut tidak lebih dari 300 mil. Dalam cakupan kawasan daratan dan laut itu diperlukan konsep-konsep penerahan dan penyebaran kekuatan disertai kriteria efektif dan efisien. Efektif karena dikaitkan dengan struktur kekuatan laut yang harus mampu mendemonstrasikan kompetensiyadilautdanefisien dikaitkan dengan sumber daya yang terbatas.⁹ Manusia sebenarnya bisa lebih banyak memiliki kekuatan dan kebutuhan untuk memanfaatkan maritimnya karena maritim lebih luas dari pada daratan.

Teori Pembinaan.¹⁰

Pembinaan adalah sebagai suatu usaha pembaharuan yang terencana di dalam suatu kultur melalui penggunaan teknologi, riset, dan teori perilaku. Pembinaan merupakan program yang berjangka panjang, dan menyangkut proses dari suatu sistem yang luas. Sebagai konsekuensi dari program yang berencana

dan berjangka panjang maka dibutuhkan sistem pengelolaan yang baik, pengelolaan ini harus dilakukan secara hati-hati dan penuh kesadaran, selain itu pengelolaan sangat membutuhkan koordinasi sehingga dapat dihindari kegiatan pembinaan yang berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu, peran TNI AL sangat dibutuhkan sebagai salah satu organisasi militer yang bertanggung jawab terhadap pembinaan potensi maritim yang dapat dijadikan sebagai potensi nasional guna mendukung pertahanan negara di laut dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Keberadaan Babinpotmar diharapkan bisa bersinergi dengan semua staf instansi terkait yang merupakan *steak holder* dalam pembinaan dan pengembangan potensi Maritim. Dengan dibentuknya Babinpotmar berarti Posal-Posal TNI AL yang ada di seluruh Indonesia dapat melakukan Pembina sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya alam. Babinpotmar sebagai salah satu jabatan dalam organisasi TNI AL (militer) diharapkan bertanggung jawab terhadap pembinaan potensi maritim yang dapat dijadikan sebagai potensi nasional guna mendukung pengendalian wilayah pertahanan laut dalam rangka pembangunan negara dan keutuhan wilayah Indonesia.

PEMBAHASAN

Indonesia adalah Negara maritim dan kepulauan (*the maritime and archipelagic state*) terbesar di dunia, dengan memiliki kurang lebih 17.508 pulau dan 81.000 km garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada) serta 75 % (5,8 juta km²) wilayahnya berupa laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) memiliki batas-batas wilayah berupa perairan laut dengan 10 negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu : Filipina, India, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Australia, Papua Nugini, Timor Leste dan Palau.¹¹ Indonesia dikatakan sebagai negara maritim karena tujuh puluh lima persen dari wilayah Indonesia (5,8 juta km²) merupakan laut.¹²

Adapun ciri-ciri Negara maritim adalah sebagai berikut :

9. Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/07/II/2001 tentang Doktrin TNI Angkatan Laut Eka Sasana Jaya Tanggal 23 Februari 2001.

10. Miftah Thoha, Pembinaan Organisasi, Rajawali Pers, Jakarta 1989, hal 13.

11. Arif Djohan Tunggal, *Pokok-Pokok Hukum Laut*, Jakarta : Harvarindo 2010, hal 39.

12. Rilus A. Kinseng, *Konflik Nelayan*, Penerbit : Yayasan Pustaka Bogor Indonesia, Jakarta, 2014, hal 3.

- Negara maritim adalah sebuah Negara yang memiliki kawasan territorial laut yang luas.
- Negara maritim umumnya berbentuk Negara kepulauan atau Negara yang memiliki banyak pulau.
- Negara maritim adalah satu Negara yang memiliki berbagai kekayaan alam dalam kekuasaan laut yang cukup luas.
- Negara maritim adalah Negara yang secara geografis dikelilingi oleh wilayah perairan dan laut.
- Maritim memiliki pengertian wilayah laut. Penduduk Negara maritim pada umumnya berprofesi sebagai nelayan.

Hakekat dan konsep Negara maritim adalah menggunakan segala sumber kekayaan laut untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.¹³ Kekayaan laut harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sumber daya hayati maupun non hayati yang terdapat di dalam laut, tanah dan dasar laut di bawahnya sudah seharusnya dapat dikelola oleh anak bangsa sendiri guna dinikmati oleh rakyat Indonesia, tidak boleh ada bahan mentah yang diekspor ke luar negeri kemudian di olah di luar negeri selanjutnya masuk ke Indonesia dalam bentuk sudah jadi dengan harga yang mahal dirasakan oleh rakyat Indonesia.¹⁴ Untuk mewujudkan semuanya itu, diperlukan suatu niat bahwa masyarakat maritim harus mempunyai kebudayaan maritim agar dapat menjadikan maritim sebagai ladang kesejahteraan dan kawasan pertahanan keamanan.

Persoalan masyarakat maritim Indonesia saat ini adalah, mengapa sebagai negara yang memiliki garis pantai sangat panjang, justru kebudayaan maritim tidak muncul? Mengapa Indonesia justru lebih dekat kepada budaya agraris? Padahal luas daratannya lebih kecil dari luas lautan.¹⁵ Untuk memunculkan dan memiliki kebudayaan maritim oleh masyarakat maritim, sudah saatnya TNI AL

13. <http://www/materi4belajar.blogspot>, di download pada tanggal 11-01-2019 pukul 21.30 wib.

14. Simanjuntak Mangisi, *Konvensi PBB 1982 tentang Hukum*

Laut, Makna dan Manfaatnya bagi Bangsa Indonesia, Penerbit : Mitra Wacana Media, Jakarta 2018, hal 13.

15. Amarulla Octavian & Bayu A Yulianto, *Budaya, Identitas & Masalah Keamanan MARITIM*, Penerbit Universitas Petahanan Indonesia, Jakarta 2014, hal 6.

sebagai instansi yang dominan berperan dalam bidang maritim tampil ke depan agar dapat menjadikan maritim sebagai *prosperity* (kemakmuran) dan *security* (keamanan) bagi bangsa Indonesia yang memerlukan pembinaan potensi maritim (Binpotmar).

Binpotmar merupakan upaya pekerjaan dan tindakan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut secara perorangan maupun satuan melalui komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, bakti TNI Angkatan Laut dan pembinaan wilayah perbatasan laut untuk membangun kemandirian TNI Angkatan Laut dengan rakyat dalam rangka mewujudkan RAK Juang yang tangguh.¹⁶

Uraian kegiatan Binpotmar adalah sebagai berikut :

- Pembinaan Komunikasi Sosial Maritim merupakan suatu kegiatan antara TNI Angkatan Laut dengan masyarakat, pemerintah, keluarga besar TNI dan komponen bangsa lainnya.
- Pembinaan Ketahanan Wilayah Maritim merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut sendiri atau bersama pemerintah/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan komponen bangsa lainnya untuk mewujudkan kekuatan pertahanan wilayah maritim.
- Bakti TNI Angkatan Laut, Penyelenggara kegiatan bakti TNI Angkatan Laut dilaksanakan atas kerjasama TNI Angkatan Laut dengan Pemerintah, Kementerian/LPNK, instansi terkait serta masyarakat.¹⁷

TNI AL sebagai bagian integral TNI harus mampu menyusun dan menyiapkan potensi pertahanannya meliputi aspek geografi, demografi dan kondisi sosial di seluruh wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mewujudkan hal tersebut, TNI AL baik Armada, Lantamal, Lanal maupun Posal sudah saatnya mengembangkan satuan-satuan kerjanya yang bergerak di bidang potensi maritim agar dapat menangani permasalahan-permasalahan dalam mengembangkan potensi maritim tersebut.

16. Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/ 2639/ VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018 tentang *Doktrin Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut*, point 13.

17. Ibid pada point 13d.

Posal yang merupakan ujung tombak yang menangani tugas-tugas Dawilhanla terdiri dari Posal Kelas A yang dikomandani Perwira berpangkat Letnan Satu (Lettu), Posal Kelas B yang dikomandani Perwira berpangkat Letnan Dua (Letda), Posal Kelas C yang dikomandani Bintara berpangkat Pembantu Letnan Satu (Peltu).¹⁸ Seharusnya Posal-Posal tersebut memiliki Babinpotmar yang berpangkat Bintara agar bisa bersinergi dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNIA AD dan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) Polri dalam menangani pembinaan potensi maritim.

Babinpotmar di Posal Kelas A berpangkat Sersan Mayor (Serma), di Posal Kelas B berpangkat Sersan Kepala (Serka) atau Sersan Satu (Sertu), Di Posal Kelas C berpangkat Sersan Dua (Serda). Babinpotmar-Babinpotmar tersebut seyogyanya memiliki kemampuan komunikasi sosial yang baik, santun dan cerdas serta tidak emosional yang mampu merangkul masyarakat untuk bersama-sama mengelola segenap potensi maritim di daerah binaan menjadi kekuatan pangan, industri, kekuatan pertahanan, oleh karena itu setiap prajurit yang akan ditempatkan sebagai Babinpotmar seharusnya mengikuti kursus atau penataran Babinpotmar yang dilaksanakan oleh staf potensi maritim/ dinas potensi maritim.

Adapun tugas-tugas yang dibebankan kepada Babinpotmar adalah :

- Melaksanakan fungsi pembinaan potensi maritim dan bertugas pokok melatih rakyat dalam penyuluhan bidang pertahanan laut serta pengawasan fasilitas dan prasarana pertahanan di pesisir.
- Melatih rakyat dalam penyuluhan bidang pertahanan laut maksunya membantu negara demi terlaksananya kegiatan komponen cadangan (Komcad) dan komponen dukungan (Komduk).
- Mendukung perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengerahan serta pengendalian potensi maritim dengan segenap unsur geografi, demografi serta kondisi sosial untuk dijadikan sebagai ruang,

alat dan kondisi juang (RAK Juang) demi kepentingan pertahanan negara.

- Memberikan penyuluhan kesadaran bela negara.
- Memberikan penyuluhan pembangunan di bidang pertahanan dan mendukung kesejahteraan masyarakat maritim
- Melakukan pengawasan fasilitas/ prasarana pertahanan di pesisir.
- Membina dan mengembangkan potensi maritim baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia (nelayan dan insan maritim lainnya).

Keberadaan Babinpotmar di jajaran Satuan Komando Wilayah (Satkowil) di seluruh Posal sangat penting, selain sebagai prajurit terdepan yang bersosialisasi langsung dengan masyarakat maritim di desa pesisir, di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, juga memiliki fungsi dan tugas yang penting untuk menentukan dalam pengumpulan data Potensi Maritim. Eksistensi seorang Babinpotmar sebagai ujung tombak TNI Angkatan Laut dalam hal pembinaan masyarakat maritim, desa pesisir maupun dalam pengelolaan industri jasa maritim di wilayah merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan pembinaan potensi maritim di masa yang akan datang. Tugas Babinpotmar secara terus menerus mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data territorial di seluruh wilayah binaan TNI AL terutama di bidang maritim untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu aspek pertimbangan pimpinan di dalam menentukan cara bertindak yang baik.

Kekuatan maritim Cina yang membina milisinya dan kaum nelayan Cina melanjutkan perjuangan mereka menjadikan China sebagai kekuatan maritim besar sebagaimana yang diperintakan Presiden Cina Xi Jinping.¹⁹ Keberadaan Babinpotmar juga demikian, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan perekrutan dan pelatihan serta pergerakan Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen dukungan (Komduk) untuk TNI AL di lapangan guna pertahanan laut khususnya dalam pengendalian wilayah pertahanan laut apabila terjadi konflik dengan negara-negara tetangga yang berbatasan laut dengan negara Indonesia disebabkan perebutan sumber daya alam.

18. Keputusan Kasal nomor KEP/467/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 dan Keputusan Kasal Nomor Kep/ 326/II/2016 tanggal 16 Februari 2016.

19. <https://news.detik.com/abc-australia/d-3205761/china-diduga-gunakan-nelayan-sebagai-milisi-di-laut-china-selatan>, di akses pada tanggal 13 Januari 2019 pukul 22.31 Wib.

Sementara itu, kita juga dapat melihat bagaimana sumber daya alam kita diperebutkan bangsa lain. Dari sejak dahulu bangsa asing berusaha mengambil harta kekayaan laut kita dengan berbagai cara. Tidak ada alasan untuk memandang bahwa hal ini tidak lagi terjadi di masa kini. Artinya, masih ada ancaman dari bangsa asing yang ingin mengambil manfaat dari laut kita yang luas.²⁰ Kekayaan laut dan potensi maritim Indonesia yang melimpah banyak dicuri oleh bangsa lain. Oleh karena itu, untuk mencegah pencurian kekayaan laut kita terutama ikan agar tidak terjadi lagi, perlu adanya pembinaan kepada nelayan-nelayan sebagai ujung tombak dan adanya kekuatan maritim yang tangguh. Hal ini harus sudah menjadi komitmen nasional.

Peranan TNI AL dalam upaya mendukung komitmen nasional tentang kelautan yang merupakan pemanfaatan potensi wilayah perairan nasional sebagai alternatif pembangunan bangsa guna meningkatkan perekonomian nasional, adalah merupakan kewajiban namun harus disesuaikan dengan kewenangan maupun batas-batas tugas pokok dan fungsi TNI AL sendiri yang tidak melibatkan pada fungsi dan kewenangan institusi lain.²¹ Menumbuhkembangkan budaya, jiwa dan semangat bahari dikalangan masyarakat maritim dengan meningkatkan komunikasi sosial dialogis antara TNI AL dengan rakyat dalam suasana kekeluargaan yang akrab, wajar dan dinamis.²² Kegiatan ini merupakan salah satu upaya-upaya peningkatan potensi maritim terutama sumber daya perikanan sesuai dengan sasaran pembangunan TNI AL abad XXI.

Sumber daya perikanan merupakan asset alam yang diekstraksi untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia. Namun demikian aspek manfaat ini memiliki berbagai dimensi, baik dimensi ekonomi, ekologi maupun sosial. Kompleksitas sumber daya ikan ini menyebabkan tujuan pembangunan perikanan yang semakin kompleks.²³ Salah satu ba-

han pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya adalah ikan, apabila semakin banyak sumber perikanan dan dapat dihasilkan serta dinikmati oleh masyarakat maka dapat dikatakan masyarakat tersebut sejahtera. Tugas Babinpotmar juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat maritim, masyarakat maritim yang sejahtera akan memperkuat pertahanan laut berbasis kelautan.

Membangun negara berbasis kelautan harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari perencanaan, kebijakan sampai pada aksi di lapangan yang didukung oleh berbagai sisi seperti permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kita belum mengarah kesana.²⁴ Perencanaan yang baik dalam membangun negara yang berbasis kelautan akan menghasilkan negara maritim yang besar, negara maritim yang besar adalah negara yang maritimnya (laut dan lingkungannya) kuat dalam membangun negaranya dan mempertahankan lautnya. Pembinaan dan pengembangan potensi maritim saat ini sudah waktunya ditangani secara serius oleh satu satker di instansi TNI AL, sebagai ujung tombaknya dalam pembinaan dan pengembangan potensi maritim adalah Babinpotmar, Oleh karena itu, Babinpotmar sudah waktunya saat ini direalisasikan/diwujudkan dengan tugas-tugas yang telah disampaikan diatas, bersinergi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas juga berkoordinasi dengan instansi terkait yang menangani maritim.

Kesimpulan

1. Dihadapkan dengan semakin kompleksnya tugas di bidang Dawilhanla, dalam rangka pembinaan dan pengembangan potensi maritim, keberadaan Babinpotmar sangat penting dan sangat dibutuhkan.
2. Dengan adanya jabatan Babinpotmar di Posal-Posal diseluruh Indonesia, penambahan anggaran sangat perlu untuk mendukung pelaksanaan tugas/kegiatan Binpotmar.

Saran

1. Mohon dapatnya dalam proses validasi organisasi TNI AL diakomodasikan terbentuk struktur jabatan Babinpotmar pada tingkat Posal-Posal.

20. Ade Prasetya, *Ekonomi Maritim Indonesia*, Penerbit : Diandra Kreatif, Yogyakarta 2016, hal 49.

21. Alumni AKABRI Laut 1973 (AAL.XIX), *Bunga Rampai, Lautku Pengabdianku*, Yayasan Prasetya Jala Utama, Jakarta, 2001, hal 240-241.

22. Markas Besar TNI AL, *Pembinaan Potensi Maritim Untuk Mendukung Pertahanan Nasional Di Laut Memasuki Abad XXI*, Jakarta, Januari 2000, hal 26.

23. Akhmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan, Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan*, Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2010, hal 27.

24. Maritim Indonesia : *Perjuangkan Laut Jadi Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)*, Tahun 2013 hal 9

2. Mohon dapatnya pemberian tunjangan Babinpot- mar baik tunjangan jabatan maupun tunjangan kinerja untuk mendukung pelaksanaan tugas/ kegiatan Binpotmar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/ Majalah

- Ade Prasetya, *Ekonomi Maritim Indonesia*, Penerbit : Diandra Kreatif, Cetakan 1, Yogyakarta 2016.
- Akhmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan, Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan*, Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2010.
- Alumni AKABRI Laut 1973 (AAL.XIX), *Bunga Rampai, Lautku Pengabdianku*, Yayasan Prasetya Jala Utama, Jakarta, 2001
- Amarulla Octavian & Bayu A Yulianto, *Budaya, Identitas & Masalah Keamanan MARITIM*, Penerbit Universitas Petahanan Indonesia, Jakarta Juli 2014.
- Arif Djohan Tunggal, *Pokok-Pokok Hukum Laut*, Penerbit : Harvarindo, Cetakan pertama, Januari 2010.
- Didit Herdiawan, *Kedaulatan Pangan Maritim, Dinamika & Problematika*, Penerbit : Lembaga Ketahanan Nasional RI, Cetakan ke-satu, Jakarta, 2016.
- Herry Setianegara, *Strategi Maritim Pada Perang Laut Nusantara dan Poros Maritim Dunia*, Penerbit : leutikaprio, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Desember 2014.
- Jurnal Maritim Indonesia, *Pertumbuhan Ekonomi Maritim di Kepulauan Nusantara*, Pusat Pengkajian Maritim, Seskoal, September 2018
- Maritim Review ppal, *Momentum Menyelesaikan Masalah Mendasar di Laut Sebagai Prasyarat Terwujudnya Negara Maritim yang Maju*, Penerbit : Persatuan Purnawiwana Angkatan Laut, Jakarta 2017.
- Maritim Indonesia : *Perjuangkan Laut Jadi Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)*, Edisi 30, Tahun 2013
- Markas Besar TNI AL, *Pembinaan Potensi Maritim Untuk Mendukung Pertahanan Nasional Di Laut Memasuki Abad XXI*, Jakarta, Januari
- Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi*, Rajawali Pers, Cetakan Pertama, Jakarta 1989.
- M. Husseyin Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia*, Penerbit : Fikahati Aneska, Cetakan kedua Jakarta 2015.
- Rilus A. Kinseng, *Konflik Nelayan*, Penerbit : Yayasan Pustaka Bogor Indonesia, Cetakan pertama, Jakarta, November 2014.
- Simanjuntak Mangisi, *Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut, Makna dan Manfaatnya bagi Bangsa Indonesia*, Penerbit : Mitra Wacana Media, Jakarta 2018.
- B.Undang-Undang/ Keputusan / Doktrin : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/07/II/2001 tentang Doktrin TNI Angkatan Laut
- Eka Sasana Jaya Tanggal 23 Februari 2001.
- Keputusan Kasal nomor KEP/467/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 dan Keputusan Kasal Nomor Kep/ 326/II/2016 tanggal 16 Februari 2016.

C. Internet :

- [http/ www/ materi4belajar.blogspot](http://www/materi4belajar.blogspot), di download pada tanggal 11-01-2019 pukul 21.30 wib.
- <https://news.detik.com/abc-australia/d-3205761/china-diduga-gunakan-nelayan-sebagai-milisi-di-laut-china-selatan>, di akses tanggal 13 Januari 2019 pukul 22.31 Wib.